

SAMBUTAN KOMNAS PEREMPUAN

Kita Bersikap:

Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa
Puncak Perayaan 10 Tahun Komnas Perempuan

Oleh Kamala Chandrakirana, Ketua
30 November 2009

Pada bulan Mei 1998, Indonesia tergoncang oleh sebuah peristiwa kekerasan yang kemudian menjadi akhir dari salah satu babak dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Kerusuhan massal yang terjadi di Jakarta dan berbagai kota lain diarahkan pada salah satu komunitas minoritas dalam keluarga besar bangsa Indonesia, dan kaum perempuannya dijadikan sasaran serangan-serangan yang keji karena keperempuanannya. Perkosaan yang terjadi pada peristiwa ini menjadi trauma tersendiri bagi bangsa kita dan, beberapa bulan setelahnya, Presiden B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai wujud dari komitmen serta dukungannya pada perjuangan gerakan perempuan Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sebagai komisi nasional independen pertama yang dilahirkan pasca Orde Baru, sebagaimana pernah kami tegaskan, Komnas Perempuan adalah putri sulung Reformasi.

Tujuh tahun kemudian, pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen Pemerintah pada perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan memperbaharui landasan hukum keberadaan Komnas Perempuan melalui sebuah Peraturan Presiden yang kini menjadi landasan kerja kami. Kita bersyukur atas kehadiran dan peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden B.J. Habibie pada hari ini, saat Komnas Perempuan menyelenggarakan acara puncak perayaan 10 tahun berdirinya komisi nasional untuk hak-hak asasi perempuan ini. Saya mengajak para hadirin menyatakan penghargaan atas langkah yang telah diambil oleh kedua Presiden Republik Indonesia dalam memajukan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia.

Juga hadir diantara kita adalah Ibu Saporinah Sadli, salah satu sosok penggerak lahirnya Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang kemudian membidani kelahiran Komnas Perempuan. Beliau akan memberikan Orasi Kebangsaan sebagai penutup acara hari ini. Kepada Ibu Sadli, kami sampaikan terima kasih atas kebersamaannya, hari ini dan selama ini.

Kami juga berterima kasih kepada Bapak Benny Harman, Ketua Komisi III DPR RI yang menangani bidang Hukum, HAM dan Keamanan, yang telah menyediakan waktu bagi kita untuk menyampaikan komitmennya guna memastikan kewenangan dan kepemimpinannya di DPR RI dapat memberi arti nyata bagi perempuan Indonesia.

Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati,

Dalam sepuluh tahun ini, Komnas Perempuan tidak pernah berhenti bekerja, mencari jalan untuk menembus tembok-tembok kultural dan politis dalam upaya mengungkap dan menyikapi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan Indonesia dan perempuan dari bangsa lain atas nama Indonesia. Melalui pelaksanaan mandat pemantauannya, Komnas Perempuan telah membuka tabir atas berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di tengah konflik bersenjata – seperti penyiksaan, eksploitasi dan perbudakan seksual – maupun kekerasan yang dialami perempuan dalam proses bermigrasi untuk kerja serta di balik pintu rumahnya sendiri. Semua fakta kekerasan yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan berasal dari pengalaman korban sendiri, yang disampaikan secara langsung ke Komnas Perempuan maupun melalui lembaga-lembaga pendamping dan pemberi layanan yang merupakan mitra Komnas Perempuan.

Dari keseluruhan fakta-fakta ini, Komnas Perempuan memperoleh, antara lain, sebuah gambaran utuh tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang dialami perempuan selama kurun waktu empat dasawarsa, khususnya pada saat-saat dimana bangunan kebangsaan Indonesia sedang terkoyak-koyak. Kapan? Pada bulan Mei 1998 ketika komunitas etnis Tionghoa diserang secara sistematis di tengah krisis ekonomi dan perebutan kekuasaan politik; ketika warga masyarakat yang telah tinggal bersebelahan puluhan tahun kemudian saling serang-menyerang atas nama agama atau sukunya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di Maluku, Poso, Kalimantan, dan di berbagai daerah tempat tinggal komunitas Ahmadiyah; juga ketika Aceh, Papua dan Timor Timur dijadikan daerah operasi militer yang menimbulkan kesengsaraan bagi begitu banyak penduduk sipil; dan bahkan, 45 tahun yang lalu, ketika penyerangan habis-habisan terhadap segala yang dianggap komunis menelan begitu banyak korban yang tak bersalah.

Seluruh fakta kekerasan terhadap perempuan yang dikumpulkan dalam lima tahun terakhir kerja Komnas Perempuan mencakup 45 tahun dari 64 tahun perjalanan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Keterbatasan-keterbatasan dalam mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran HAM telah menyebabkan sebagian besar korban belum memperoleh keadilan. Fakta-fakta ini dicatat bukan dengan maksud mempersulit persatuan diantara kita, melainkan justru untuk menguatkan kebersamaan dengan meneguhkan nilai-nilai luhur bangsa.

Ibu, Bapak, Saudara sekalian,

Sebagai mekanisme nasional untuk hak-hak asasi perempuan, yang kelahirannya juga ditentukan oleh adanya perjuangan perempuan di tingkat internasional untuk mendapatkan pengakuan hak-hak perempuan sebagai hak-hak asasi manusia, Komnas Perempuan senantiasa menata pelaporan-pelaporannya dalam kerangka HAM. Semua laporan HAM yang diterbitkan Komnas Perempuan telah diserahkan kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga negara lain yang terkait untuk penanganannya. Pembelajaran pertama yang kami dapatkan dari seluruh proses ini adalah betapa panjangnya proses pertanggungjawaban hukum untuk pelanggaran-pelanggaran berat HAM berbasis gender, karena perangkat hukum yang tidak memadai di tingkat nasional dan karena tidak adanya jalur khusus untuk ini dalam mekanisme HAM internasional.

Sementara ketidakmungkinan proses pertanggungjawaban masih belum terpecahkan, visi kita tentang tatanan berbangsa di Indonesia mengalami krisis. Proses demokratisasi itu sendiri telah menggoyahkan landasan krusial dari kebangsaan Indonesia, yaitu keberagaman kita. Di berbagai tempat, satu versi interpretasi terhadap agama mayoritas hendak dijadikan landasan tunggal bagi tatanan kenegaraan kita, dan pengaturan terhadap tubuh dan jati diri perempuan menjadi sarana pencapaian niat politis ini. Dalam situasi inilah, Komnas Perempuan bertekad untuk menempatkan segala pengalaman perempuan terkait kekerasan dan diskriminasi yang telah ditemukannya, dalam konteks perjalanan bangsa. Karena dinamika inilah, Komnas Perempuan merasakan urgensi untuk melengkapi perangkat pengetahuan yang dapat mendorong perempuan untuk, dengan penuh percaya diri, mengambil tempat kepemimpinannya dalam seluruh proses perumusan ulang visi kebangsaan Indonesia di era reformasi ini.

Buku KITA BERSIKAP ditulis untuk menjawab urgensi ini. Walaupun bisa tampak seperti buku akademis, buku ini sesungguhnya adalah sebuah landasan bagi sebuah penyikapan nasional oleh bangsa, negara dan perempuan Indonesia, untuk memastikan pertanggungjawaban kita terhadap pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi atas nama Indonesia. Gambar pada sampul buku adalah foto reruntuhan yang tersisa dari sebuah rumah di Pidie, Aceh, yang ditunjuk oleh para saksi dan korban sebagai tempat penyiksaan terhadap banyak perempuan Aceh. Kami pilih foto ini sebagai sampul sebagai simbol dari saksi-saksi bisu yang perlu ditempatkan dalam ingatan dan kesadaran kita jika kita benar-benar serius melawan impunitas. Keseluruhan pengalaman empat dasawarsa kekerasan terhadap perempuan kami tempatkan di tengah pahit manisnya peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kami jadikan landasan untuk memetakan jalan ke depan. Termasuk diantaranya adalah langkah untuk mengintegrasikan kepemimpinan dan pengalaman perempuan dalam penulisan, pengajaran dan peringatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dalam segenap kejatuhan dan kebangkitannya.

Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang kami hormati,

Apa yang berhasil dicapai oleh Komnas Perempuan dalam 10 tahun kerjanya tidak mungkin tanpa dukungan dan peran para perempuan korban kekerasan itu sendiri. Perkenankanlah kami menggunakan kesempatan hari ini untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan para korban yang telah diberikan kepada kami. Dalam perjumpaan kami dengan para korban, kami menemukan sosok-sosok perempuan yang, di tengah kesakitannya, berdiri tegak, bersikap tegar, dan berhati besar. Dari Anda semua kami belajar tentang apa artinya bersikap. Sebagian diantaranya ada bersama kita dalam ruangan ini. Dalam proses kerja Komnas Perempuan, kami berkenalan dengan sosok seperti Ibu Siti Suratih yang kini berumur 87 tahun. Ia seorang bidan yang ditahan pada peristiwa 1965 dan hidup selama lebih dari sepuluh tahun di tempat tahanan perempuan di Plantungan. Pada suatu hari, di Panti Jompo Waluyo Sejati Abadi, kami mendengar bagaimana baktinya kepada bangsa tidak luntur sedikit pun bahkan di dalam kurungan tahanan. Sepanjang masa tahanan, ia memberi perawatan medis, bukan hanya bagi sesama penghuni tahanan tetapi juga bagi masyarakat desa yang hidup di sekelilingnya. Warga sekitarnya bahkan menjulukinya sebagai “dokter manjur”.

Kami sadar bahwa setiap upaya Ibu, Kakak dan Adik-adik untuk mengingat kembali peristiwa yang sedemikian menyakitkan juga membuka luka yang sangat pribadi. Pada hari ini, atas nama perempuan dimana-mana, Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda semua. Karena, tanpa peran setiap perempuan korban yang duduk dan berbicara dengan kami tentang pengalamannya, bangsa Indonesia tidak akan bisa memperoleh pemahaman yang sepeenuh-penuhnya dan sejujur-jujurnya tentang perjalanan sejarahnya sendiri.

Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang kami hormati,

Ke depan, kita semua – bangsa dan negara – perlu memberi tempat layak bagi para korban, yang telah menjadi saksi sejarah melalui tubuh dan perjuangan hidupnya. Mereka perlu diberi tempat yang layak dan bermartabat di dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat saat ini. Bukan hanya demi pemenuhan hak-hak korban, melainkan juga demi peneguhan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seluruh bangsa Indonesia.

Komnas Perempuan menyesalkan begitu lamanya waktu berjalan sebelum gerakan perempuan di Indonesia dapat mengungkapkan pengalaman para perempuan yang menjadi korban dari jatuh banggunya bangsa ini selama empat dasawarsa terakhir. Kami sesalkan segala keterbatasan kami untuk mengakhiri stigma yang masih terus membayang-bayangi para korban hingga sekarang. Stigma ini terus melekat karena beban penjaga moralitas dan kesucian keluarga dan masyarakat secara tidak adil diletakkan pada pundak perempuan semata; karena adanya penolakan berbagai pihak terhadap kepemimpinan perempuan di segala ranah kehidupan; dan, karena pertarungan politik makro yang telah mempersalahkan pilihan-pilihan afiliasi dan aktivisme politik perempuan. Sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk menatap kekeliruan-kekeliruan masa lalu agar dapat membantu pemulihan semua korbannya dan memastikan bahwa masa depan perempuan Indonesia dapat terbebas dari pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Dengan adanya buku KITA BERSIKAP dan terbitan-terbitan lain serupa, Komnas Perempuan berharap kita punya landasan yang kokoh untuk mengeluarkan diri dari jeratan siklus kekerasan, termasuk hingga ke akar-akarnya yang kuat bercokol di dalam segala bentuk diskriminasi yang berlaku dalam kehidupan kita.

Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa seluruh langkah untuk pemulihan korban perlu dibangun di atas dan bersama rangkaian upaya dan gerakan yang bertujuan untuk mengubah nilai-nilai masyarakat dan peran institusi-institusi agar tidak lagi melanggengkan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara dan tidak lagi membuat pemisahan antara privat dan publik yang memojokkan perempuan. Segala inisiatif yang diambil untuk memulihkan korban tidak boleh melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender, apalagi mengingat banyaknya inisiatif “perlindungan” yang justru berakibat pada pembatasan ruang gerak dan kedaulatan diri korban dan perempuan secara umum. Langkah-langkah pemulihan bagi perempuan korban harus sejalan dan tidak terpisah dari upaya-upaya yang lebih luas untuk pemberdayaan perempuan, termasuk keberdayaan ekonomi perempuan. Pada akhirnya, pemulihan perempuan korban kekerasan baru bisa tercapai secara nyata jika ini merupakan bagian dari seluruh upaya komunitas di sekitarnya, dan institusi-institusi sosial dan

negara yang mempengaruhi hidupnya, untuk melakukan pembaruan terhadap tatanan negara-bangsa yang lebih luas, yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan bagi semua warganya tanpa kecuali, sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita, UU Dasar Negara RI 1945.

Kepada Presiden Republik Indonesia, kami sampaikan bahwa Komnas Perempuan meyakini bahwa seluruh maksud dari buku dan acara ini sejalan dengan visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembangkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Secara khusus, Komnas Perempuan berharap agar Pemerintah dapat:

1. mengambil langkah-langkah khusus untuk memberidukung dan pemberdayaan bagi para perempuan korban yang membutuhkan, atas dasar kemanusiaan dan tanpa membedakan korban atas dasar suku, ras, umur, kelas, kepercayaan, ataupun pandangan politik, termasuk melibatkan mereka dalam segenap acara peringatan perjuangan bangsa, seperti Hari Kartini dan Hari Ibu serta Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Kemerdekaan;
2. mencabut kebijakan Negara yang mengukuhkan stigma pada perempuan korban dan yang menyebabkan perempuan korban tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara;
3. melengkapi penulisan, pengajaran dan memorialisasi sejarah bangsa Indonesia dengan kisah-kisah perjuangan dan pengalaman perempuan sesuai dengan temuan-temuan mutakhir tentang peran-peran kepemimpinan perempuan serta pembelajaran tentang dampak peristiwa-peristiwa besar bangsa pada perempuan;
4. membangun sistem hukum yang adil dan peka terhadap kerentanan-kerentanan khas perempuan serta menjamin pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan; serta
5. meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam menjalankan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dengan dukungan Presiden ini, semestinya kita bisa optimis bahwa kepemimpinan perempuan akan menjadi aset yang bermakna bagi seluruh proses demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara seperjuangan,

Dalam menjalankan proses pendokumentasian tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan senantiasa memastikan bahwa di tengah-tengah proses itu sendiri berlangsung upaya-upaya pemulihan korban, pemberdayaan perempuan dan rekonsiliasi masyarakat. Semua laporan HAM Komnas Perempuan, yang telah dihasilkan bukan oleh para pakar melainkan oleh perempuan-perempuan pemimpin yang teguh menempatkan kebenaran dan keadilan di atas segalanya, selalu diakhiri dengan rangkaian rekomendasi perubahan kebijakan dan pembaruan institusional dalam segenap bidang tanggung jawab negara. Sejalan dengan itu, pada acara hari ini dan kemarin (ketika kita merayakan aktivisme perempuan), komunitas korban dari Papua, Aceh, Tionghoa, peristiwa 1965 dan penghilangan paksa menunjukkan ketegaran dan martabat dirinya kepada kita semua melalui ekspresi budaya yang menyentuh hati. Dalam kerangka HAM internasional, keseluruhan proses ini sering disebut “keadilan transisional”. Dalam niat dan pemikiran Komnas Perempuan, ini adalah pertanggungjawaban perempuan warga atas sejarah gelap bangsanya sendiri.

Komnas Perempuan sangat berbangga bahwa warga perempuan Indonesia telah menjadi salah satu ujung tombak dalam seluruh upaya bangsa dan negara untuk memperbaharui dirinya, untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu masa lalu yang menyesatkan. Kaum perempuan Indonesia patut berbangga bahwa gerakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan jender telah menjadi pembuka jalan bagi bangsa untuk menatap masa lalunya secara jujur dan tulus demi perbaikan dan kebaikan masa depan.

Jalan kita masih panjang. Masih begitu banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Kita butuh sarana untuk terus berproses. Pada hari ini, Komnas Perempuan juga akan meluncurkan sebuah kampanye bertema “Mari Bicara Kebenaran”. Kami berharap, kata-kata ini dapat ikut membongkar budaya diam yang menjauhkan kita dari keadilan selama ini. Melalui kampanye ini kita dapat sama-sama mendorong terjadinya pertemuan-pertemuan di berbagai pelosok negeri ini, antara warga bangsa dan para korban kekerasan – perempuan dan laki-laki – demi pemulihan korban dan seluruh bangsa kita. Kami berterima kasih kepada semua pihak dari kalangan warga bangsa yang telah bersedia memberikan teladannya pada hari ini. Juga kepada semua pihak dari komunitas korban yang menyanggupi untuk memberikan kesan dan pesannya kepada kita semua di ruangan ini siang nanti.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati,

Kebenaran adalah landasan yang tidak bisa ditawar-tawar dalam upaya kita memperbaharui diri. Pada saat kita memasuki dasawarsa kedua dari proses reformasi bangsa dan negara, marilah kita jadikan kebenaran sebagai landasan bagi awal yang baru.

Akhir kata, Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu, Bapak, Saudara-saudara melalui kehadiran dan peran sertanya dalam acara ini. Juga terima kasih kepada para tamu internasional yang telah melakukan perjalanan panjang untuk ada bersama kita hari ini. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Moon Khung Ran, komisioner dari Komnas HAM Korea, dan Rory Mungoven, Ketua Unit Asia Pasifik di Komisi Tinggi HAM PBB, atas kesediaannya untuk memberikan sepatah dua kata dalam acara ini. Kehadiran mereka semua menegaskan bahwa perjuangan kita di Indonesia adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan yang melintasi batas negara. Keterlibatan mereka dalam proses kita adalah pernyataan tersendiri bahwa perempuan Indonesia sekaligus adalah warga dunia dan bahwa pembelajaran yang diperoleh di Indonesia adalah juga pembelajaran bagi perempuan di mana-mana yang berjuang untuk kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan.

Demikian sambutan Komnas Perempuan. Terima kasih.